



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN), perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi dan diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja DTPH tahun 2022. Akhir kata, semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan terima kasih.

Sukomananti, Januari 2022
Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat



IKHTISIAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 9 (sembilan) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja

(*performance result*) tahun 2022 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi tersebut di atas.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran diungkapkan di dalam Bab-Bab LKjIP ini, Segala keberhasilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang, sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Sukomananti, Januari 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat



drh. DODDY SAN ISMAIL, MM

Pembina / IV.a

NIP. 19860331 201101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pembentukan Instansi	1
1.2 Gambaran Umum DTPHP	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan	5
1.4 Isi Strategis	6
1.5 Sumber Daya Aparatur	6
1.6 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	7
1.7 Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.....	14
2.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja 2022.....	20
3.1.2 Analisis dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	22
3.1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja DTPHP	24
3.1.4 Analisis dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra	33
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Kinerja DTPHP .	34

3.2 Perbandingan Data Kinerja	39
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022	40
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Strategi dan Pemecahan Masalah	44

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Instansi

Sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat. Namun tanggal 2 Januari terbit Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana terjadi perubahan SOTK dengan nama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.2. Gambaran Umum DTPHP

1.2.1. Struktur Organisasi Instansi

Pada Pasal 5 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Dinas	: drh. DODDY SAN ISMAIL, MM
2.	Sekretaris Dinas	: YULINA, S.Si, M.Si
	a. Ka.Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	: NOVRIA HAYATI, SE
	b. JF Perencana Ahli Muda	: FITRIA SANTI, SP
	c. JF Analis Keuangan Pusat/Daerah	: DEWI ROSALINA, S.Pt
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	: AFDAL, SP
	a. JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian	: ADILAH, SP
	b. JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian	: RISANTI ELTIANA, S.Pt
	c. Ka. Seksi Perbenihan dan Bina Usaha	: -
4.	Kepala Bidang Peternakan dan Keswan	: drh. LENNY SYAMZA
	a. Ka. Seksi Keswan dan Kesmavet	: -
	b. JF Pengawas Bibit Ternak	: DIAN EKA APRIANI, S.Pt
	c. Ka. Pakan dan Bina Usaha Peternakan	: -
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	: HENDRIKO SAPUTRA, S.Pt, M.Si
	a. Ka. Seksi Alat dan Mesin Pertanian	: -
	b. Ka. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air	: -
	c. JF Analis Prasarana	: NENI NURLINA, S.Pt

6.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	: SARIDIN, SP
	a. JF Penyuluhan Pertanian	: FITRIA, S.Pt
	b. JF Penyuluhan Pertanian	: GUSNELITA, SP
	c. JF Penyuluhan Pertanian	: DESI TRISNAYANTI, S.Pt
7.	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	
	a. Kepala UPT Puskeswan Wilayah I	: drh. TRICENELI DEVIANI
	b. Kepala UPT Puskeswan Wilayah II	: drh. KLACIPTA DAMELKA
	c. Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH)	: M. JHONI ADRAL, SP
8.	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	
	a. Kepala BPP Kecamatan Ranah Batahan	: SUHARMEN, SST
	b. Kepala BPP Kecamatan Koto Balingka	: DWI RAHAYU, SP
	c. Kepala BPP Kecamatan Lembah Melintang	: DESI RAHMIATY, SP
	d. Kepala BPP Kecamatan Sungai Aur	: WILEM RELMA YENI
	e. Kepala BPP Kecamatan Gunung Tuleh	: EMNI SALVIA PUTRI, SP
	f. Kepala BPP Kecamatan Pasaman	: LUKMAN, SP
	g. Kepala BPP Kecamatan Talamau	: REFQI JUPRI, A.Md
	h. Kepala BPP Kecamatan Luhak Nan Duo	: SUHENTI, SP
	i. Kepala BPP Kecamatan Kinali	: IFNA RAHMI. SST
	j. Kepala BPP Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	: SYAFRI MUNANTAS, A.Md
	k. Kepala BPP Kecamatan Sungai Beremas	: ZILVIA SYAHRITA, SP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu unsur Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat.

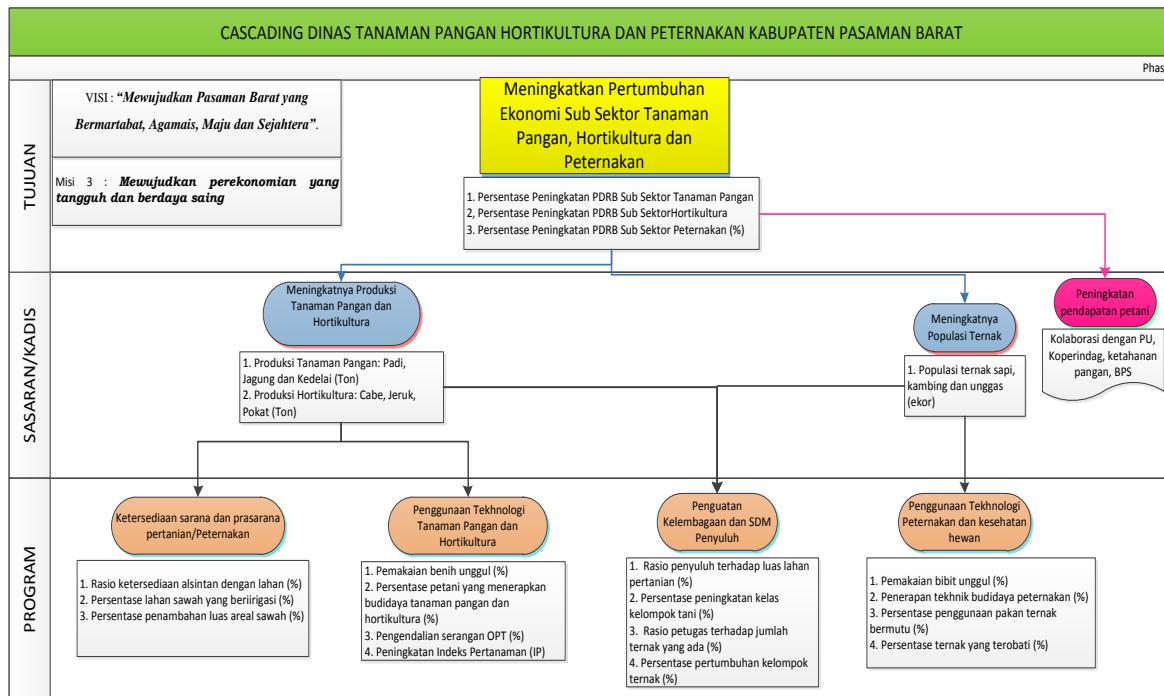
Tugas pokok dan fungsi derta uraian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

Pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas-tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi amat berperan pada misi ke 3. Prioritas dari misi ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat adalah ***Mewujudkan perekonomian yang***

tangguh dan berdaya saing. Dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh upaya yang dilakukan dinas dapat terlihat dalam cascading Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.



Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*).

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021 – 2026
3. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2022

1.4. Isu Strategis

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
4. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
5. Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi.
6. Masih kurangnya kualitas SDM petani.
7. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
8. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
9. Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan, serta generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian dan peternakan.
10. Masih kurangnya tenaga teknis menengah bidang pertanian dan peternakan.

1.5. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat keadaan pada per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 225 orang dengan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.6. Rincian Golongan ASN

Golongan (PNS/Honor)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
IV	8
III	29
II	23
I	-

Honor Daerah	2
Honor Kontrak	126
P3K	18
Petugas Pertanian Lapangan	-
Jumlah	206

Tabel 1.7. Latar belakang pendidikan aparatur

Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
S3	-
S2	11
S1	162
D IV	-
D III	8
D II	-
D I	-
SLTA	22
SLTP	2
SD	1
Jumlah	206

Cat: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honor Daerah, Honor Kontrak, P3K, dan Petugas Pertanian Lapangan

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022, yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat, dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan LKj Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta peningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKj yaitu diharapkan dapat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.7. Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan rencana kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam pelaksanaannya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan mendukung pencapaian Visi Kabupaten Pasaman Barat yaitu **“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”** dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menjadi amat berperan pada misi ke 3. Prioritas dari misi ketiga dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat salah satunya adalah **“Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing”**.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berada pada sasaran 4.3 yaitu Penguatan industri berbasis komoditas unggulan local dengan strategi salah satu sasaran wujud perekonomian yang tangguh dan berdaya saing adalah dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan yang dihasilkan. Kedaulatan pangan juga harus menjadikan petani sebagai subjek bukan objek pembangunan.

Tabel 2.1.Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas petani dan perlunya penguatan kelembagaan 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian 3. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana lahan dan air 4. Rendahnya tingkat pendapatan petani pertanian 5. Belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan hortikultura dan peternakan) 6. Pengamanan produksi dari gagal panen akibat bencana dan serangan OPT 7. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi 8. Berkurangnya populasi ternak 9. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pendidikan petani dan kelompok sasaran 2. Jumlah SDM penyuluh masih kurang 3. Rendahnya kualitas dan kapasitas penyuluh dan aparatur teknis di lapangan 4. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal 5. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran 6. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak 7. Berkembangnya pasar bebas 8. Petani tergoda untuk alih fungsi lahan ke komoditi perkebunan 9. Sinergitas antar SKPD belum terjalin dengan optimal 10. Kurangnya pengetahuan peternak terhadap PHMS 11. Belum ada kajian pengembangan ternak lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 2. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura 3. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal 4. Ketersediaan sumber daya pertanian 5. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian 6. Ketersediaan dukungan anggaran 7. Ketersediaan fasilitas alsintan 8. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, kartu tani dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 9. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek 10. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

Tujuan

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada *logical framework* (cascading) yang telah

disusun berdasarkan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi III RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

Tabel 2.1. Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan DTPHP
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovatif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovatif	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DTPHP
Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan
			Indikator : PDRB per Kapita ADHB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (Rp.juta)

Sasaran

Sasaran disusun sebagai sebagai instrumen yang menggambarkan/ menjelaskan kondisi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan isu strategis daerah dan kesesuaianya terhadap misi kepala daerah, tupoksi dan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan.

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dari Dinas Pertanian adalah Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan populasi ternak.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran DTPHP Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Meningkatnya produksi dan provitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan/ Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(33,3)	(6,67)	5,13	1,86	1,07	1,86	1,82
			114.980	117.343	119.980	121.230	123.654	126.007
			265.551	283.005	287.556	290.081	294.897	299.752
	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya							
	Padi	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
	Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):							
	Cabai (Ton)	9.558	9.726	9.896	10.069	10.245	10.425	10.607
	Jeruk (Ton)	9.718	9.718	9.888	9.892	10.065	10.241	10.420
	Alpukat (Ton)	2.396	2.896	3.396	3.896	4.396	4.896	5.396
2 Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/ Penurunan populasi komoditas ternak :	-1,81	1,98	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80
			19.929	20.229	20.529	20.829	21.129	21.429
	Kambing	14.056	14.266	14.476	14.686	14.896	15.106	15.316
	Unggas	720.934	735.334	749.743	764.134	778.534	792.934	807.334
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
	Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
	Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan Dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021 – 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
1	2	3	4
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan	1. % Peningkatan/ Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan	<i>Total produksi tahun ini (ton/Ha) - Total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total produksi tahun ini (ton/Ha)</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defisini Operasional
	dan Hortikultura	2. % Peningkatan/ Penurunan produksi komoditas Hortikultura	<i>Total produksi tahun ini (ton/Ha) - Total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total produksi tahun ini (ton/Ha)</i>
		3. Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	<i>Hasil Ubinan KSA dari BPS</i>
2.	Meningkatnya populasi ternak	1. % Peningkatan/ Penurunan populasi komoditas Ternak	<i>Jumlah ternak tahun sekarang (ekor) – Jumlah ternak tahun lalu (ekor)/ Jumlah ternak tahun sekarang (ekor)</i>
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja DTPHP	1. Peningkatan nilai SAKIP	Hasil Penilaian Menpan RB
		2. Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Menpan BPKP
		3. Jumlah Temuan BPK	Hasil Penilaian Menpan BPK

Sumber : Data DTPHP 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada tahun 2022 dan semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, sesuai dengan format PERMENPAN&RB Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan 2022 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Sasaran		Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Indikator Kinerja Program (Output)
1.	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	2. Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):	3. 1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4. Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton) komoditas: Padi Jagung	5. 117.343 283.005	6. Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit) Jumlah benih unggul bersertifikat Peningkatan produksi ternak (ton)
				Cabai	9.869	
				Jeruk Alpukat	9.888 3.396	
				Produktivitas Padi Persentase ketersediaan bibit ternak	4,7 27%	
				Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak	20%	
2.	2. Meningkatnya populasi ternak		2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	1. JUT: 5 Km 2. Dam parit:15 unit 3. JITUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskeswan: 7 unit 6. BBTPH:1 unit 7. BPTHPT:1 unit	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

						Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)
			3 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	50%	Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS)
				Peningkatan populasi komoditas ternak		Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner
				Sapi	20.793	
				Kambing	14.750	
			4 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Unggas	749.743	Jumlah lokasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	20%	
				1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih	1. 1% 2. 1%	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan nilai SAKIP 2. Level Maturitas SPIP 3. Opini terhadap Laporan Keuangan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantor Persentase realisasi keuangan Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola Jumlah pengadaan BMD

2.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas DTPHP. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
A.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	9.112.091.843	APBD
B.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.274.747.500	APBD, DAK, DAK NF
C.	Program penyediaaan dan pengembangan prasarana pertanian	2.388.378.799	APBD, DAK, DAK NF
D.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	655.803.000	APBD, DAK NF
E.	Program penyuluhan pertanian	5.382.801.358	APBD, DAK, DAK NF

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.753.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.291.115.033	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.040.000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.884.800	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.263.960	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.150.350	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.674.100	APBD

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.210.600	APBD
9.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	916.952.000	APBD, DAK
10.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	66.475.500	APBD
11.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	291.320.000	APBD
12.	Pengembangan Prasarana Pertanian	148.707.500	APBD
13.	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.239.671.299	APBD, DAK
14.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.357.000	APBD
15.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	449.446.000	APBD, DAK NF
16.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.382.801.358	APBD, DAK, DAK NF

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja =(Realisasi/Target) x 100%

Untuk menilai ketercapaian kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Interval prediket capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% sd > 100%	Sangat Tinggi
2	76% sd < 90%	Tinggi
3	66% sd < 75%	Sedang
4	51% sd < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2022 merupakan rangkaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat seperti diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penilaian Capaian Kinerja DTPHP Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Prediket
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan /Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,13	(18,75)	(366)	Sangat rendah
		Padi	117.343	95.753	82	Tinggi
		Jagung	283.005	222.855	79	Tinggi
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya				

		Padi	4,70	4,90	104	Sangat Tinggi
		Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):				
		Cabai (Ton)	9.896	5.223	53	Rendah
		Jeruk (Ton)	9.888	7.027	71	Sedang
		Alpukat (Ton)	3.396	12.618	372	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :	1,94	1,94	100	Sangat Tinggi
		Sapi	20.529	20.781	101	Sangat Tinggi
		Kambing	14.476	14.801	102	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Unggas	749.743	1.263.632	169	Sangat Tinggi
		Peningkatan nilai SAKIP	B (68)	BB (70)	103	Sangat Tinggi
		Level Maturitas SPIP	2,35	2,35	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Temuan BPK	6	4	150	Sangat Tinggi
		Capaian Rata-Rata			87	Tinggi

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura

1. % Peningkatan /Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura (padi, jagung, Cabe, Jeruk dan Alpukat).

Data produksi didapatkan dari data luas tanam, luas panen dan produktivitas yang didapat dari petugas statistik pertanian kecamatan kemudian diverifikasi dan validasi oleh petugas statistik pertanian kabupaten.

$$\text{Produksi} = \text{Luas Panen} \times \text{Produktivitas}$$

2. Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Padi)

Angka produktivitas didapat dari hasil ubinan $1\text{ M} \times 1\text{ M}$ yang lokasinya ditetapkan melalui titik koordinat yang dikirim BPS Pusat

setelah panen ditimbang oleh petugas dan dirata-ratakan sebagai angka produktivitas kabupaten.

Sasaran 2 : Meningkatnya populasi ternak

1. % Peningkatan /Penurunan populasi komoditas ternak (sapi, kambing dan unggas)

Data populasi ternak didapatkan dari petugas peternakan yang berada di kecamatan kemudian divalidasi oleh petugas kabupaten dan provinsi setelah final kemudian dilaporkan ke Badan Pusat Statistik untuk data Pasaman Barat Dalam Angka.

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP

Sasaran ketiga terdapat 3 indikator kinerja dimana capaiannya sangat baik. Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor 700/1396/Inspekt./2022 menunjukkan dari 31 OPD yang dievaluasi terdapat 14 Perangkat Daerah yang memperoleh BB sementara 17 lainnya mendapat nilai B salah satunya adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Untuk level maturitas mencapai target 100% begitu juga dengan jumlah temuan mengalami penurunan.

3.1.2. Analisis dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Adapun Sasaran, Indikator dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja DTPHP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Rasio Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan /Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Padi	(6,67)	5,13	(5,50)	(18,75)	82	(366)
			114.980	117.343	109.883	95.753	96	82
		Jagung	265.551	283.005	271.047	222.855	102	79
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Padi	4,65	4,70	4,80	4,90	103	104
		Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton): Cabai (Ton)	9.726	9.896	5.689	5.223	58	53
		Jeruk (Ton)	9.718	9.888	10.198	7.027	105	71
		Alpukat (Ton)	2.896	3.396	11.054	12.618	382	372
2	Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :	1,98	1,94	1,98	1,94	100	100
		Sapi	20.229	20.529	20.360	20.781	101	101
		Kambing	14.266	14.476	13.887	14.801	97	102
		Unggas	735.334	749.743	1.188.499	1.263.632	162	169
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (65)	B (68)	B (65)	BB (70)	100	103
		Level Maturitas SPIP	2,11	2,35	2,11	2,35	100	100
		Jumlah Temuan BPK	7	6	6	4	117	150
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN IKU DTPHP							87

Berdasarkan tabel diatas rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah mencapai prediket **Tinggi (87)**.

3.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja DTPHP

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura

1. % Peningkatan /Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura (padi, jagung, Cabe, Jeruk dan Alpukat).

Tabel 3.4 menunjukkan capaian kinerja pelayanan DTPHP tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan produksi beberapa komoditi salah satunya padi dimana penurunan produksi padi, dari 109.883 ton pada Tahun 2021 menjadi 95.390 ton pada Tahun 2022. Penurunan ini sejalan dengan penurunan luas tanam komoditi padi, dari 22.956 hektar pada Tahun 2021 menjadi 19.906 hektar pada Tahun 2022. Penurunan produksi maupun luas tanam disebabkan oleh sejumlah permasalahan, antara lain terdapat bendungan di kecamatan gunung tuleh yang baru dibangun oleh PU melalui dana IPDMIP rusak kembali setelah hujan lebat. Selain itu di kecamatan talamau jaringan irigasi juga banyak yang rusak karena gempa tanggal 25 Februari 2022 sehingga petani ada yang beralih menanam komoditi lain.

Selain itu produksi jagung juga mengalami penurunan hal ini disebabkan karena petani Kabupaten Pasaman Barat fanatic dengan benih pioner 32 dimana saat itu benih tersebut langka di pasaran dan harga pupuk pun mahal. Petani tidak menanami lahannya sampai benih tersedia kembali. Selain itu jagung yang berintegrasi dengan sawit sudah tidak bisa ditanami lagi karena sawitnya sudah berumur lebih dari 2 tahun.

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat produksi Kabupaten Pasaman Barat dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Dimana

Kabupaten Pasaman Barat merupakan penghasil jagung terbesar di Sumatera Barat.

Tabel 3.5 Produksi Jagung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Total Produksi 2022
(1)	
01 Kepulauan Mentawai	116
02 Pesisir Selatan	203.028
03 Solok	1.412
04 Sijunjung	6.750
05 Tanah Datar	22.303
06 Padang Pariaman	41.016
07 Agam	115.927
08 Lima Puluh Kota	41.774
09 Pasaman	106.274
10 Solok Selatan	91.984
11 Dharmasraya	2.274
12 Pasaman Barat	215.650
71 Padang	207
72 Solok	328
73 Sawah Lunto	738
74 Padang Panjang	-
75 Bukittinggi	138
76 Payakumbuh	2.081
77 Pariaman	1.022
JUMLAH	853.024

Untuk komoditi hortikultura seperti cabe mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021 hal ini disebabkan karena cuaca yang ekstrim (sering hujan) menyebabkan OPT cabe berkembang seperti lalat buah, ulat grayak, layu cendawan dan thrips sehingga cabe sehingga produksi sedikit menurun. Harga cabe menjadi mahal dipasaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten

Pasaman Barat terdapat kegiatan bantuan bibit cabe, pupuk dan pestisida namun pendropingan dilakukan sudah di akhir tahun sehingga untuk produksinya masuk ketahun 2023. Dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL 3.3. LUAS SERANGAN OPT CABE (Ha) DI SUMATERA BARAT

TAHUN 2022

No	Kabupaten / Kota	Luas Serangan OPT (Ha)										Jumlah
		Virus Kunin g	Lalat Buah	Antrakn osa	Kutu Daun	Ulat Gray ak	Layu Cenda wan	Thrips	Layu Bakt eri	Tung au	Puru Buah	
1	Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasaman Barat	-	0,20	-	-	0,35	0,06	0,45	-	-	-	1,06
3	50 Kota	-	1,15	3,25	-	-	-	1,50	-	-	-	5,90
4	Agam	34,80	22,1	31,32	4,00	-	1,00	20,00	2,00	0,65	5,40	121,27
5	Tanah Datar	3,46	35,6	53,20	-	-	2,60	25,75	-	4,10	-	124,71
6	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Solok	-	1,00	-	-	16,0	4,50	0,50	-	-	-	22
8	Solok Selatan	-	1,50	1,80	-	-	4,10	10,20	-	-	-	17,6
9	Sijunjung	-	-	0,20	0,15	-	-	0,10	-	-	-	0,45
10	Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pesisir Selatan	2,85	10,9	0,80	0,10	-	-	1,50	-	-	-	16,15
12	Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bukittinggi	1,80	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	2,10
14	Pdg. Panjang	-	2,90	4,00	-	-	-	-	-	-	-	6,90
15	Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Pariaman											-

SUMATERA BARAT	42,91	75,4	94,87	4,25	16,4	12,26	60,00	2,00	4,75	5,40	318,14
----------------	-------	------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------	--------

Data produksi cabai keriting untuk wilayah Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah. Dimana Kabupaten Pasaman Barat berada pada urutan ke enam sebagai penghasil cabai keriting setelah Kebupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 3.6 Produksi Cabai Keriting (Ton) SUMATERA BARAT Tahun 2022

Kabupaten/Kota		Jumlah
Kode	Nama	
1	2	3
1	KEPULAUAN MENTAWAI	4
2	PESISIR SELATAN	5.042
3	SOLOK	34.255
4	SIJUNJUNG	994
5	TANAH DATAR	21.517
6	PADANG PARIAMAN	1.115
7	AGAM	34.932
8	LIMA PULUH KOTA	10.612
9	PASAMAN	911
10	SOLOK SELATAN	9.649
11	DHARMASRAYA	363
12	PASAMAN BARAT	5.223
13	PADANG	172
14	SOLOK	55
15	SAWAH LUNTO	416
16	PADANG PANJANG	673
17	BUKITTINGGI	609
18	PAYAKUMBUH	1.522
19	PARIAMAN	153
SUMATERA BARAT		128.218

Komoditi hortikultura lainnya yang mengalami penurunan adalah jeruk hal ini disebabkan karena tanaman jeruk banyak

terserang OPT busuk pangkal batang dan lalat buah sehingga produksi menurun selain itu terdapat beberapa kecamatan yang mulai menanam kembali seperti di Kecamatan Rabat, Lembah Melintang dan Gunung Tuleh namun belum menghasilkan.

**TABEL 3.7 LUAS SERANGAN OPT JERUK (Batang) DI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Luas Serangan OPT (Batang)						Jumlah
		Busuk Pangkal Batang	Diplodia	CVPD	Jamur Upas	Lalat Buah	Hama Kepik	
1	Pasaman	343	-	10	412	-	-	765
2	Pasaman Barat	1.655	-	-	-	150	-	1.805
3	50 Kota	-	-	-	-	148.900	-	148.900
4	Agam	-	-	2.075	150	15.720	200	18.145
5	Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-
6	Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-
7	Solok	-	-	-	-	-	-	-
8	Solok Selatan	-	-	-	-	-	88	88
9	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-
10	Dharmasraya	-	15	-	-	-	-	15
11	Pesisir Selatan	-	-	-	-	1.665,00	-	1.665
12	Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-
13	Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-
14	Pdg. Panjang	-	-	-	-	-	-	-
15	Padang	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-
17	Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-

18	Pariaman	-	-	-	-	-	-	-
SUMATERA BARAT		1.998	15	2.085	562	166.435	288	171.383

Data produksi jeruk untuk wilayah Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut. Terlihat pada data tersebut bahwa Kabupaten Pasaman Barat penghasil keempat terbesar di Sumatera Barat setelah Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 3.8 Produksi Jeruk (Ton) SUMATERA BARAT Tahun 2022

Kode	Kabupaten/Kota Nama	Jumlah
1	KEPULAUAN MENTAWAI	3
2	PESISIR SELATAN	4.465
3	SOLOK	1.955
4	SIJUNJUNG	2.639
5	TANAH DATAR	5.670
6	PADANG PARIAMAN	371
7	AGAM	69.863
8	LIMA PULUH KOTA	59.593
9	PASAMAN	3.348
10	SOLOK SELATAN	18.284
11	DHARMASRAYA	157
12	PASAMAN BARAT	7.027
13	PADANG	229
14	SOLOK	1
15	SAWAH LUNTO	282
16	PADANG PANJANG	325
17	BUKITTINGGI	291
18	PAYAKUMBUH	78
19	PARIAMAN	16
	SUMATERA BARAT	174.595

Dalam indikator diatas juga terdapat peningkatan seperti produksi komoditi Alpukat dimana hal ini disebabkan petani banyak yang menanam Alpukat karena harganya cenderung stabil dan pemeliharaannya pun tidak susah. Didukung dengan adanya

bantuan dari APBN berupa sarana dan prasarana seperti gudang dan alat pasca panen.

Tabel 3.9 Produksi Alpukat (Ton) [13] SUMATERA BARAT Tahun 2022

Kabupaten/Kota		Jumlah
Kode	Nama	
1	2	3
1	KEPULAUAN MENTAWAI	3
2	PESISIR SELATAN	221
3	SOLOK	52.934
4	SIJUNJUNG	125
5	TANAH DATAR	10.542
6	PADANG PARIAMAN	732
7	AGAM	25.644
8	LIMA PULUH KOTA	4.949
9	PASAMAN	510
10	SOLOK SELATAN	1.393
11	DHARMASRAYA	34
12	PASAMAN BARAT	12.618
13	PADANG	556
14	SOLOK	55
15	SAWAH LUNTO	1.731
16	PADANG PANJANG	224
17	BUKITTINGGI	421
18	PAYAKUMBUH	612
19	PARIAMAN	197
SUMATERA BARAT		113.501

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasaman Barat penghasil Alpukat ketiga terbesar di Sumatera Barat setelah Kabupaten Agam.

2. Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Padi)

Selain itu produktivitas padi juga mengalami peningkatan hal ini disebabkan petani mulai melakukan penerapan teknologi seperti

penggunaan pupuk organik, pemanfaatan alsintan, pemupukan yang tepat dan cara pengendalian serangan OPT.

Tabel 3.10 Produktivitas Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022

No	Nama Kabupaten	TAHUN 2022
		Produktivitas (Ton/ha)
1	KEPULAUAN MENTAWAI	2,3
2	PESISIR SELATAN	5,6
3	SOLOK	5,5
4	SIJUNJUNG	3,8
5	TANAH DATAR	5,5
6	PADANG PARIAMAN	5,0
7	AGAM	5,0
8	LIMA PULUH KOTA	4,6
9	PASAMAN	4,9
10	SOLOK SELATAN	4,1
11	DHARMASRAYA	4,8
12	PASAMAN BARAT	4,9
13	PADANG	5,1
14	SOLOK	6,5
15	SAWAH LUNTO	6,3
16	PADANG PANJANG	7,0
17	BUKITTINGGI	6,6
18	PAYAKUMBUH	5,5
19	PARIAMAN	5,2
SUMATERA BARAT		5,1

Sasaran 2 : Meningkatnya populasi ternak

1. % Peningkatan /Penurunan populasi komoditas ternak (sapi, kambing dan unggas)

Dari komoditas peternakan pada umumnya meningkat dari tahun sebelumnya seperti sapi terjadi peningkatan padahal kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sedang mewabah hal ini disebabkan karena

tingkat kelahiran sapi dan kambing tinggi kemudian tahun 2021 juga ada bantuan sapi (32 ekor), kambing (32 ekor) dan unggas (1.350 ekor). Dalam pengendalian PMK langsung ditindaklanjuti dengan penutupan pasar ternak dan pengobatan secara intens oleh petugas terhadap ternak yang terkena PMK.

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Akuntabilitas DTPHP

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)	Predikat
1.	Peningkatan nilai SAKIP	B (68)	BB (70)	103	Sangat Tinggi
2.	Level Maturitas SPIP	2,35	2,35	100	Sangat Tinggi
3.	Jumlah Temuan BPK	6	4	150	Sangat Tinggi

Sasaran ketiga terdapat 3 indikator kinerja dimana capaiannya sangat baik. Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor 700/1396/Inspekt./2022 menunjukkan dari 31 OPD yang dievaluasi terdapat 14 Perangkat Daerah yang memperoleh BB sementara 17 lainnya mendapat nilai B salah satunya adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Untuk level maturitas mencapai target 100% begitu juga dengan jumlah temuan mengalami penurunan.

3.1.4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Dalam menyusun dokumen rencana kerja tahunan target yang ditetapkan disesuaikan dengan dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan telah ditetapkan yang harus dicapai dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Tahun 2026 merupakan terakhir yang ingin dicapai dalam periode lima tahun.

Tabel.3.12 Capaian Kinerja DTPH Tahun 2022 dan Tahun 2026

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Target Renstra
			2022	2022	2026
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,13	(18,75)	36,17
		Padi	117.343	95.753	126.007
		Jagung	283.005	222.855	299.752
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya			
		Padi	4,70	4,90	4,90
		Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):			
		Cabai (Ton)	9.896	5.223	10.607
		Jeruk (Ton)	9.888	7.027	10.420
		Alpukat (Ton)	3.396	12.618	5.396
2.	Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :	1,94	1,94	1,80
		Sapi	20.529	20.781	21.429
		Kambing	14.476	14.801	15.316
		Unggas	749.743	1.263.632	807.334
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (68)	BB (70)	BB (78)
		Level Maturitas SPIP	2,35	2,35	>2,6
		Jumlah Temuan BPK	6	4	2

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari sumber daya keuangan. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang capaian sasaran organisasi. Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.112.091.843 dengan realiasasi sebesar Rp. 8.650.631.235 atau 94%.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Kinerja DTPHP

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

⊕ Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian (SPP). Kegiatan berupa bantuan sarana pertanian seperti Alsintan dan benih.

⊕ Realisasi kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.916.952.000,- dengan realisasi Rp. 870.224.780,- atau 94% dan fisik 100%. Indikator kinerja yaitu jumlah sarana pertanian yang dibantu dengan target alsintan sebanyak 183 unit dan benih cabe 20.000 batang. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket

sangat tinggi (100%) sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi.

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- ⊕ Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan Bidang Peternakan. Kegiatan berupa pemurnian dan kelestarian benih sebar yang merupakan plasma nutfah lokal unggulan serta peningkatan kualitas dari ternak lokal.
- ⊕ Realisasi kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.64.475.500,- dengan realisasi Rp. 62.920.200,- atau 95% fisik 100%. Indikator kinerja adalah (1) jumlah benih unggul bersertifikat dengan target 40 Kg dan 3.000 straw. (2) jumlah plasma nutfah yang dilestarikan target 3 varietas. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **sangat tinggi (100%)** sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi.

3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

- ⊕ Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Peternakan. Kegiatan berupa bantuan dari dana aspirasi dewan dan program prioritas pimpinan daerah berupa bantuan pakan dan kandang ternak.
- ⊕ Realisasi kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.291.320.000,- dengan realisasi Rp. 102.128.400,- atau 35% fisik 50%. Indikator

kinerja adalah peningkatan produksi ternak dengan target 1.690 Ton. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **Rendah** (50%) hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang dianggarkan saat perubahan sehingga waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan untuk selanjutnya agar penganggaran dilakukan di awal tahun.

B. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

- ⊕ Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian (SPP). Kegiatan berupa bantuan dari dana pendampingan APBN dan Revisi Perda LP2B.
- ⊕ Realisasi kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.148.707.500,- dengan realisasi Rp. 131.607.306,- atau 86% fisik 90%. Indikator kinerja adalah peningkatan produksi ternak dengan target 1.690 Ton. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket **tinggi** hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan sosialisasi belum terlaksana karena Revisi Perda selesai di akhir tahun. Diharapkan untuk selanjutnya kegiatan sudah dimulai dari awal tahun dengan perencanaan yang matang.

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

- ⊕ Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian (SPP), Bidang Peternakan dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Kegiatan berupa bangunan

fisik irigasi, jalan usaha tani, bangunan Puskeswan, bangunan RMU dan UV Dryer.

⊕ **Realisasi kegiatan**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.239.671.299,- dengan realisasi Rp. 1.772.880.848,- atau 79% fisik 93%. Indikator kinerja adalah Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/ diperbaiki dengan target irigasi 4 paket, JUT 1 paket, puskeswan 3 paket. Kegiatan ini terlaksana dengan prediket Baik hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan pengadaan UV Dryer berasal dari DAK dimana saat penyusunan Rencana Kegiatan dengan kondisi saat ini berbeda dimana terjadi kekurangan dana untuk ongkos kirim alat tersebut karena adanya kenaikan BBM. Dimana pengajuan dana DAK harus sudah terkontrak tanggal 21 Juli tidak bisa dianggarkan diperubahan. Untuk selanjutnya diharapkan ada persediaan dana dari APBD sebagai antisipasinya.

C. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

⊕ Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Peternakan berupa pembelian obat-obatan dana sarana penunjang untuk pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) termasuk dana sosialisasi dan perjalanan.

⊕ **Realisasi Kegiatan**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.206.357.000,- dengan realisasi Rp. 189.644.350,- atau 92% fisik 100%. Indikator kinerja adalah persentase penurunan PHMS yang tertangani target 80%. Kegiatan terlaksana dengan prediket **Tinggi** sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi.

2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Peternakan berupa pembelian obat-obatan dana sarana penunjang untuk pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) termasuk dana sosialisasi dan perjalanan tim.
- Realisasi kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.449.446.000,- dengan realisasi Rp. 374.227.964,- atau 83% fisik 100%. Indikator kinerja adalah jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan jasa medik veteriner target 11 kecamatan. Kegiatan terlaksana dengan prediket Sangat Baik sisa anggaran hanya berupa rasionalisasi karena anggaran dari DAK Non Fisik ada beberapa yang sama dengan anggaran yang disediakan provinsi.

D. Program Penyuluhan Pertanian

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Penyuluhan berupa penyediaan sarana penunjang penyuluhan dan rehabilitasi bangunan BPP, pembinaan kelompok tani berupa peningkatan kualitas SDM petani.

⊕ Realisasi kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.38.801.358,- dengan realisasi Rp. 4.696.692.968,- atau 87% fisik 95%. Indikator kinerja adalah (1) jumlah balai penyuluhan pertanian target 11 BPP, (2) Persentase peningkatan kelas kelompok tani target 1%, dan (3) cakupan kelompok tani yang terbina target 1.315 kelompok. Kegiatan terlaksana dengan prediket **Tinggi** sisa anggaran terjadi karena pedoman pelaksanaan kegiatan IPDMIP terlambat sehingga pelaksanaannya tertunda kemudian terdapat dana luncuran ditahun 2023 sekitar Rp.100.000.000,-

3.2 Perbandingan Data Kinerja

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2021	2022
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
1	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	100	100
2	Jumlah benih unggul bersertifikat (Kg)	100	100
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
3	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	75	100
4	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	100	100
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(93)	106
6	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner	100	100
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		

7	1. Pelaksanaan penyuluhan tingkat kabupaten (kali) 2. Pelaksanaan penyuluhan tingkat kecamatan (kali) 3. Pelaksanaan penyuluhan tingkat WKP (poktan)	100 100 100	100 100 100
---	--	-------------------	-------------------

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DTPHP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN PENDANAAN KEGIATAN APBD
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu (Rp)	Total Realisasi		
			FISIK		KEUANGAN
			%	Rp.	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<u>9.112.091.843</u>	<u>100</u>	<u>8.560.631.235</u>	<u>94</u>
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>53.753.000</u>	<u>100</u>	<u>53.517.800</u>	<u>100</u>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.753.000	<u>100</u>	53.517.800	<u>100</u>
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>8.291.115.033</u>	<u>100</u>	<u>7.768.227.862</u>	<u>94</u>
	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.085.230.033	100	7.562.492.862	94
	3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.985.000	100	93.985.000	100
	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.900.000	100	111.750.000	100
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<u>66.040.000</u>	<u>100</u>	<u>65.545.000</u>	<u>99</u>
	5. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.770.000	100	48.770.000	100
	6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.270.000	100	16.775.000	97

4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.884.800	100	25.004.000	93
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.884.800	100	25.004.000	93
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.263.960	100	290.093.989	99
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.822.000	100	6.292.000	92
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.422.960	100	102.302.900	100
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.189.000	100	3.159.000	99
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.710.000	100	15.250.000	91
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.120.000	100	163.090.089	99
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.150.350	100	20.150.000	100
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.150.350	100	20.150.000,00	100
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.674.100	100	70.315.541	78
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.394.100	100	56.040.541	74
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.280.000	100	14.275.000	100
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.210.600	100	267.777.043	99
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.300.000	100	97.300.000	100
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.346.600	100	110.917.043	98
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.620.000	100	21.620.000	100
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gdung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.944.000	100	37.940.000,00	100
B.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.274.747.500	83	1.035.273.380	81
9.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	916.952.000	100	870.224.780	95
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	628.822.000	100	600.644.850	96
21	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	288.130.000	100	269.579.930	94
10.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	66.475.500	98	62.920.200	95
22	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	36.898.000	95	33.398.000	91
23	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	29.577.500	100	29.522.200	100
11.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	291.320.000	50	102.128.400	35
24	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	291.320.000	50	102.128.400	35

C.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.388.378.799	92	1.904.488.154	80
12.	Pengembangan Prasarana Pertanian	148.707.500	90	131.607.306	89
25	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan/LCP2B	54.360.000	80	40.292.071	74
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	94.347.500	100	91.315.235	97
13.	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.239.671.299	93	1.772.880.848,22	79
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	488.260.550	100	483.910.000	99
28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	75.000.000	100	74.924.000	100
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	0	-	-	-
30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.676.410.749	80	1.214.046.848	72
D.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	655.803.000	100	563.872.314	86
14.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	206.357.000	100	189.644.350	92
31	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	206.357.000	100	189.644.350	92
15.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	449.446.000	100	374.227.964	83
32	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	449.446.000	100	374.227.964	83
E.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.382.801.358	95	4.696.692.968	87
16.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.382.801.358	95	4.696.692.968	87
33	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	831.150.000	100	763.259.000	92
34	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.541.589.058	85	2.031.022.320	80
35	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.010.062.300	100	1.902.411.648	95
	Jumlah	18.813.822.500	94	16.760.958.051	89

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dalam tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 9 (sembilan) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2022.
2. Hasil capaian atas 14 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran penilaian sebagai berikut:
 - Terlaksana dengan prediket “sangat tinggi” sebanyak 9 indikator
 - Terlaksana dengan prediket “tinggi” sebanyak 2 indikator
 - Terlaksana dengan prediket “rendah” sebanyak 1 indikator
 - Terlaksana dengan prediket “sedang” sebanyak 1 indikator
 - Terlaksana dengan prediket “rendah” sebanyak 1 indikator
3. Belum optimalnya pencapaian target indikator sasaran terjadi karena beberapa permasalahan yaitu:
 - Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.
 - Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
 - Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.

- Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian di wilayahnya.

4.2. Strategi dan Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan kinerja DTPH dimasa mendatang perlu strategi dalam memecahkan masalah yang timbul yaitu:

- a. Dalam antisipasi konversi lahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sudah membuat perda LP2B tahun 2016 namun kondisi lahan saat ini sudah jauh berbeda maka dilakukan updating peta LP2B kemudian tahun 2023 dianggarkan dana untuk revisi perda. Diharapkan dengan adanya perda dapat diterapkan sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan.
- b. Penyuluhan diharapkan dapat merubah mindset petani untuk mau melakukan minimal 2x tanam dalam setahun hal ini dapat meningkatkan produksi. Untuk menarik minat petani perlu diadakan acara2 ceremonial dengan menghadirkan Bupati/ Pejabat lainnya. Misalnya dengan memberikan reward/doorprize kepada petani.

- c. Setiap kecamatan hendaknya menggali potensi atau menetapkan satu komoditi unggulan yang berkelanjutan sehingga perangkat daerah dapat mengintervensi dana untuk melengkapi sarana dan prasarana serta pemasarannya. Namun pelaksanaannya harus sudah dimulai dari masyarakat itu sendiri.
- d. Perlu adanya pendataan petani/buruh tani yang belum tergabung dalam kelompok tani karena sasaran bantuan adalah kelompok tani. Karena umumnya petani miskin adalah buruh tani sehingga butuh penanganan khusus dengan memberikan keahlian/sarana.
- e. Memperbanyak penyuluhan swadaya (berasal dari petani) sebagai kader penyuluhan yang sudah dibekali keahlian sehingga dalam penanganan awal terhadap hama penyakit tanaman serta penyakit hewan sehingga jika ada kejadian penanganannya cepat diatasi saat petugas tidak ditempat



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KEPALA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : drh. DODDY SAN ISMAIL, MM
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Kab. Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : HAMSUARDI
Jabatan : Bupati Pasaman Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, September 2022

PIHAK KEDUA,

BUPATI PASAMAN BARAT,
H. HAMSUARDI, S.Ag

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Drh. DODDY SAN ISMAIL, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19860331 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan	Peningkatan angka produksi tanaman pangan (ton) - Padi	117.343
		- Jagung	283.005
		Peningkatan angka produksi tanaman hortikultura (ton) - Cabai	9.869
		- Jeruk	9.888
		- Alpukat	3.396
2.	Peningkatan populasi ternak	Angka populasi ternak (ekor) - Sapi	20.793
		- Kambing	14.750
		- Unggas	749.743
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP	B (68)
		Nilai SPIP	2,35
		Jumlah Temuan BPK	6

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.112.091.843,00	APBD
2.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.249.747.500,00	APBD
3.	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.388.378.799,00	APBD
4.	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	655.803.000,00	APBD
5.	Penyuluhan Pertanian	5.382.801.358,00	APBD
	TOTAL	18.788.822.500	

Simpang Empat, September 2022

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HAMSUARDI, S.Ag



drh. DODDY SAN ISMAIL, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19860331 201101 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 – 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defisini Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	1. % Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan	<i>Total produksi tahun ini (ton/Ha) - Total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total produksi tahun ini (ton/Ha)</i>	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
		2. % Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Hortikultura	<i>Total produksi tahun ini (ton/Ha) - Total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total produksi tahun ini (ton/Ha)</i>	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
		3. Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	<i>Hasil Ubinan KSA dari BPS</i>	Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya populasi ternak	1. % Peningkatan/Penurunan populasi komoditas Ternak	<i>Jumlah ternak tahun sekarang (ekor) – Jumlah ternak tahun lalu (ekor)/ Jumlah ternak tahun sekarang (ekor)</i>	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja DTPHP	1. Peningkatan nilai SAKIP	Hasil Penilaian Menpan RB	Bagian Organisasi
		2. Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Menpan BPKP	Inspektorat
		3. Jumlah Temuan BPK	Hasil Penilaian Menpan BPK	BPKD

Sukamenanti, 17 Januari 2022
 Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan
 Hortikultura dan Peternakan
 Kabupaten Pasaman Barat



drh. DODDY SAN ISMAIL, MM

Pembina /IV.a

NIP. 19860331 201101 1 001

